



SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN *FRAUD*

Rendi Kusuma Natita¹, Amelia Setiawan², Hamfri Djajadikerta³

Email:9012301010@student.unpar.ac.id,rendi.kusuman@lecture.unjani.ac.id,
rendikusuma@ak.unjani.ac.id, rendikusuman@gmail.com

¹Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani

^{2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan

ABSTRACT.

This research discusses the government's internal control system in fraud prevention. The study shows that the implementation of SPIP (Government Internal Control System) can minimize fraudulent activities and enhance accountability in fund management. The research method used is a Systematic Literature Review focusing on scientific publications related to the topic. The research steps include database identification, keyword selection, article search, selection based on title and abstract, quality evaluation, and data storage. This research provides important insights for practitioners and researchers in efforts to prevent fraud in fund and asset management. The government's internal control system plays a crucial role in preventing fraud in the public sector. Weaknesses in the government's internal control system include resource limitations, conflicts of interest, and lack of commitment from leadership. The impact of fraud in government includes financial losses, decreased public trust, hindered development, negative influence on decision-making, and legal and investigation costs. Effective SPIP implementation and high organizational commitment are essential in preventing fraud. Recommendations for strengthening SPIP include training, professional certification, strengthening internal control systems, information technology, enhancing morality and ethics, strengthening whistleblowing, leadership support, and leadership oversight.

Keywords: *Government Internal Control System, Fraud Prevention*



ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem pengendalian intern pemerintah dalam pencegahan penipuan. Studi ini menunjukkan bahwa implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dapat meminimalkan aktivitas penipuan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Metode penelitian yang digunakan adalah Tinjauan Pustaka Sistematis yang berfokus pada publikasi ilmiah terkait topik tersebut. Langkah-langkah penelitian meliputi identifikasi database, pemilihan kata kunci, pencarian artikel, seleksi berdasarkan judul dan abstrak, evaluasi kualitas, dan penyimpanan data. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi praktisi dan peneliti dalam upaya mencegah penipuan dalam pengelolaan dana dan aset. Sistem pengendalian intern pemerintah memainkan peran penting dalam mencegah penipuan di sektor publik. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemerintah mencakup keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan kurangnya komitmen dari pimpinan. Dampak penipuan dalam pemerintahan meliputi kerugian keuangan, penurunan kepercayaan publik, menghambat pembangunan, pengaruh negatif pada pengambilan keputusan, dan biaya hukum serta investigasi. Implementasi SPIP yang efektif dan komitmen organisasi yang tinggi sangat penting dalam mencegah penipuan. Rekomendasi untuk memperkuat SPIP termasuk pelatihan, sertifikasi profesional, penguatan sistem pengendalian intern, teknologi informasi, peningkatan moralitas dan etika, penguatan pelaporan pelanggaran, dukungan kepemimpinan, dan pengawasan kepemimpinan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pencegahan Penipuan

PENDAHULUAN

Pengendalian internal adalah salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan organisasi. Dalam suatu instansi harus bisa merencanakan dan mengendalikan seluruh fungsinya supaya lebih efektif untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional pemerintah. Sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintah harus benar-benar diperhatikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku sehingga mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Setiap lembaga publik harus menjadikan peningkatan kualitas pengendalian internal sebagai poin terpenting dalam melaksanakan perubahan dan reformasi administrasi publik yang dilakukan dalam kerangka reformasi birokrasi. Kecenderungan untuk melakukan penyimpangan diyakini semakin menurun jika kualitas pengendalian internal semakin baik Sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan



memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Penelitian mengenai efektivitas SPIP dalam pencegahan fraud telah berkembang seiring waktu. Pada awalnya, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Wonar et al. (2018) serta Adiko et al. (2019) menunjukkan bahwa penerapan SPIP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Temuan ini konsisten dengan penelitian Akbar et al. (2019) yang juga menyatakan bahwa tingkat keefektifan SPIP, baik tinggi maupun rendah, tidak berdampak pada pencegahan *fraud*.

Penelitian mengenai SPIP juga menunjukkan variasi hasil berdasarkan lokasi. Di Kabupaten Lingga, hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP yang dijalankan dengan baik dapat menurunkan kecenderungan karyawan untuk melakukan kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Taufik (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan SPIP di lembaga pemerintah dapat memengaruhi efektivitas upaya pencegahan fraud. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Romadaniati et al. (2020) yang menemukan bahwa SPIP memiliki dampak positif dalam upaya pencegahan *fraud* di Kabupaten Bengkalis. Di sisi lain, penelitian di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang optimal dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan fraud. Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai budaya lokal, seperti nilai-nilai budaya Bugis, dapat memperkuat pengaruh dari implementasi SPIP dalam konteks pencegahan *fraud*.

Selain waktu dan lokasi, tren penelitian juga menunjukkan bahwa ada faktor-faktor pendukung lain yang mempengaruhi efektivitas SPIP dalam pencegahan fraud. Misalnya, penelitian oleh Akbar et al. (2019) menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* dan SPIP, dengan budaya etis organisasi sebagai pemoderasi, dapat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam efektivitas SPIP.

METODE PENELITIAN

Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA), *Systematic Literature Review* merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dan berfokus pada cara-cara yang penulis dapat memastikan pelaporan tinjauan sistematis dan transparan dan lengkap meta-analisis. Perjanjian ini tidak membahas secara langsung atau secara rinci pelaksanaannya tinjauan sistematis (Liberati et al., 2009).

Pengumpulan literatur yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi ilmiah. Dalam melakukan pencarian artikel ilmiah dilakukan dengan memasukan *keyword* pada database seperti dibawah ini :

(“SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH” AND “FRAUD”) AND
(PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2024)

Artikel yang disaring meliputi : (1) Area penelitian meliputi bidang sistem pengendalian intern pemerintah dan *fraud* (2) publikasi dilakukan pada rentang waktu tahun 2014-2024; (3) merupakan final stage publikasi (4) tipe dokumen merupakan jurnal artikel; (5) artikel menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris.



Tabel 1.1
Inklusi dan Eksklusi

Inklusi	Eksklusi
Artikel yang diteliti berasal dari <i>google scholar</i>	Artikel yang diteliti berasal dari sumber luar <i>google scholar</i>
Artikel yang diteliti berasal dari sistem pengendalian intern pemerintah dan <i>fraud</i>	Artikel yang diteliti bukan berasal dari sistem pengendalian intern pemerintah dan <i>fraud</i>
Artikel yang diteliti terbit antara tahun 2014 sampai 2024	Artikel terbit sebelum tahun 2014
Artikel yang diambil bersifat <i>open access</i>	Artikel bersifat akses berbayar
Artikel yang digunakan terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pencegahan <i>fraud</i>	Artikel yang digunakan tidak relevan dengan sistem pengendalian intern dalam pencegahan <i>fraud</i>

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berikut ini adalah langkah – langkah yang penulis lakukan untuk menyeleksi artikel:

1. Identifikasi Database: Identifikasi database yang sesuai dengan bidang penelitian . Dalam hal ini, peneliti telah menentukan bahwa Anda ingin mengakses publikasi yang ada di database Google Scholar.
2. Pemilihan Kata Kunci: Penggunaan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian.
3. Pencarian Artikel: Pencarian dengan menggunakan kata kunci yang telah disusun dalam database Google Scholar dengan rentang waktu 2014 sampai dengan 2024.
4. Penghapusan Artikel Duplikat: Menghapus duplikat untuk memastikan bahwa setiap artikel dihitung hanya sekali.
5. Seleksi Berdasarkan Judul dan Abstrak: Pemilihan artikel yang relevan dengan topik penelitian berdasarkan kesesuaian judul.
6. Penghapusan Artikel yang Tidak Relevan: Membuang artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian.
7. Bacaan Penuh Artikel: Membaca secara utuh untuk memahami isi dan metodologi penelitian dengan lebih baik.
8. Evaluasi Kualitas: Pertimbangan kualitas metodologi penelitian, kekuatan bukti, dan kredibilitas sumber dalam proses seleksi.
9. Penyimpanan Data: Menyimpan informasi tentang setiap artikel yang dipilih, termasuk judul, penulis, jurnal, tahun publikasi, dan abstraknya.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pencegahan *fraud* di pemerintahan menjadi salah satu hal yang perlu dikendalikan dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif. Penulis telah menyalur beberapa sumber penelitian dan mengulas penelitian – penelitian tersebut guna memberikan penjelasan terkait bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah diterapkan dalam pencegahan *fraud*, berikut ini adalah hasil pembahasannya:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan melibatkan beberapa langkah dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, serta untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan:

- Kebijakan dan Prosedur: Pemerintah daerah harus membuat kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penerapan sistem pengendalian intern. Kebijakan ini harus mencakup semua aspek pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi (Eldayanti et al., 2020).
- Pengawasan dan Pengendalian: Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan (Ayem & Kusumasari, 2020).
- Pelaporan dan Evaluasi: Sistem pengendalian intern harus mencakup mekanisme pelaporan dan evaluasi yang rutin. Laporan keuangan harus disusun dengan akurat dan transparan, serta dievaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan (Eldayanti et al., 2020).
- Pemantauan Pengendalian Intern (*Internal Control Monitoring*): Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas pengendalian internal. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pengendalian internal yang ada (Herawaty & Hernando, 2021).

Keunggulan sistem pengendalian intern pemerintah meliputi beberapa aspek penting bagi lembaga pemerintahan guna menjalankan operasioanal di pemerintahan. Berikut adalah beberapa keunggulannya:

- Pencegahan *Fraud*: Sistem pengendalian intern yang baik dan efektif dapat meminimalisir tindakan kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaan dana. Hal ini



sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Fresiliasari, 2023).

- Peningkatan Akuntabilitas: SPIP berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana dapat ditingkatkan, sehingga mengurangi potensi terjadinya kecurangan. Penelitian menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Ayem & Kusumasari, 2020).
- Peningkatan Efektivitas Operasional: Sistem pengendalian internal membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, serta memastikan keandalan dalam pelaporan keuangan dan perlindungan terhadap aset Negara (Wiliana et al., 2023).
- Pengendalian dan Monitoring yang Optimal: SPIP yang efektif dapat mengatasi masalah kecurangan dalam proses pelaksanaan pengadaan. Semakin optimal penerapan pengendalian internal di suatu instansi, semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pengadaan (Akbar et al., 2019).

Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah meliputi beberapa aspek penting bagi lembaga pemerintahan guna menjalankan operasioanal di pemerintahan. Berikut adalah beberapa kelemahannya:

- Keterbatasan Sumber Daya dan Kompetensi: Banyak instansi pemerintah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam menerapkan SPIP secara efektif. Keterbatasan ini dapat menghambat pelaksanaan pengendalian intern yang optimal (Widyatama et al., 2017).
- Konflik Kepentingan: Dalam konteks teori agensi, terdapat potensi konflik kepentingan antara pihak yang memberikan otoritas (prinsipal) dan pihak yang menerima otoritas (agen). Agen mungkin lebih memprioritaskan kepentingan pribadi mereka, yang dapat mengarah pada tindakan fraud (Baldock, 2016).
- Kurangnya Komitmen dari Pimpinan: Jika pimpinan tidak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan sistem pengendalian intern, maka sistem ini tidak akan berjalan dengan efektif (Ladapase, 2019).

2. Fraud

Kecurangan/*Fraud* (Tuanakotta, 2013) adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa. *Fraud* dalam pemerintahan dapat muncul oleh beberapa sebab, diantaranya:

- Kurangnya Sistem Pengendalian Internal yang Efektif: Sistem pengendalian internal yang lemah atau tidak efektif dapat memberikan peluang bagi individu



untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Sistem pengendalian internal yang baik seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah tindakan fraud (Islamiyah et al., 2020).

- Kurangnya Akuntabilitas: Akuntabilitas yang rendah dalam pengelolaan keuangan dapat memicu terjadinya fraud. Ketika tidak ada mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, peluang untuk melakukan kecurangan meningkat (Widiyarta et al., 2017).
- Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai pentingnya integritas dan etika dalam pengelolaan keuangan dapat membuat pegawai kurang sadar akan risiko dan konsekuensi dari tindakan *fraud* (Wulandari, 2021).
- Tekanan atau insentif: mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini bisa berasal dari kebutuhan finansial, target kinerja yang tidak realistis, atau keinginan untuk mempertahankan status sosial (Herawaty & Hernando, 2021)

Dampak dari munculnya *fraud* di pemerintahan tentu saja memiliki efek yang negatif bagi lembaga/instansi pemerintahan dimata masyarakat, berikut ini adalah dampak dari munculnya *fraud*:

- Kerugian Finansial: Kecurangan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemerintah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dialihkan untuk kepentingan pribadi pelaku *fraud*. Hal ini menghambat perkembangan negara dan mengurangi kualitas layanan public (Islamiyah et al., 2020).
- Menurunnya Kepercayaan Publik: Kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat mengetahui adanya penyalahgunaan dana, mereka cenderung kehilangan kepercayaan dan dukungan terhadap pegawai (Widiyarta et al., 2017).
- Penghambatan Pembangunan: Dana yang disalahgunakan tidak dapat digunakan untuk proyek pembangunan yang penting bagi negara. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang vital bagi kemajuan Negara (Wulandari, 2021).
- Pengaruh Negatif pada Pengambilan Keputusan: Informasi yang tidak akurat atau dimanipulasi akibat kecurangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Keputusan yang didasarkan pada data yang salah dapat mengarah pada strategi bisnis yang tidak efektif dan keputusan investasi yang buruk (Dewi et al., 2017).
- Biaya Hukum dan Investigasi: Organisasi yang terlibat dalam kasus kecurangan sering kali harus mengeluarkan biaya yang signifikan untuk investigasi, proses hukum, dan pemulihan kerugian. Biaya ini termasuk biaya untuk auditor forensik, pengacara, dan penyelesaian hukum (Simbolon, 2017).

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pencegahan *Fraud*



Beberapa penelitian telah menunjukkan bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah dapat mencegah *fraud*, berikut ini adalah hasil dari beberapa penelitian terkait:

- Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan. Ini berarti bahwa semakin kuat dan efektif sistem pengendalian intern yang diterapkan, semakin kecil kemungkinan terjadinya *fraud*. Untuk mencegah *fraud*, penelitian merekomendasikan untuk memaksimalkan implementasi sistem pengendalian intern dan meningkatkan pengetahuan serta pelatihan bagi pegawai guna meningkatkan akuntabilitas (Pattawe, 2023).
- Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Pengendalian internal yang kuat, termasuk pemisahan tugas, pengawasan yang efektif, dan prosedur yang ketat, dapat mengurangi risiko kecurangan (Akbar et al., 2019).
- Komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan di sektor pemerintahan. Pejabat pemerintah harus memiliki komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal yang baik, yang efektif dalam mencegah kecurangan di sektor pemerintahan (Arifin & Fathurrahman, 2022).

Hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan pencegahan fraud adalah signifikan dan positif. Penelitian – penelitian telah menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengurangi risiko terjadinya fraud dalam pengelolaan dana. Sistem pengendalian intern pemerintah berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, yang pada gilirannya membantu dalam pencegahan fraud. Bukti empiris ini sejalan dengan teori *Stewardship* yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengendalian intern dalam pencegahan fraud. Sistem pengendalian intern yang baik memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Fresiliasari, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pencegahan fraud, khususnya dalam pengelolaan dana di sektor publik. Berdasarkan hasil dari berbagai studi yang dianalisis melalui metode *Systematic Literature Review*, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPIP yang efektif dapat meminimalisir tindakan kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pencegahan fraud meliputi kompetensi pegawai, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing*. Selain itu, etika auditor, *good corporate governance*, budaya organisasi, dan komitmen organisasi juga berperan penting dalam mencegah terjadinya *fraud*. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah, seperti keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan kurangnya komitmen dari pimpinan. Faktor-faktor ini dapat menghambat efektivitas SPIP dan meningkatkan risiko terjadinya fraud. Dampak dari *fraud* di pemerintahan



sangat merugikan, termasuk kerugian finansial, menurunnya kepercayaan publik, penghambatan pembangunan, pengaruh negatif pada pengambilan keputusan, serta biaya hukum dan investigasi. Keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi sistem pengendalian internal yang kuat dan komitmen organisasi yang tinggi sangat penting dalam mencegah *fraud* di sektor pemerintahan. Upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi, juga direkomendasikan untuk mengurangi risiko kecurangan.

Saran yang dapat dipertimbangkan untuk implementasi praktis dalam penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pencegahan fraud adalah pelatihan dan pendidikan,sertifikasi professional, penguatan sistem pengendalian internal, teknologi informasi, peningkatan moralitas dan etika, Penguatan Whistleblowing, Dukungan Pimpinan dan Pengawasan Pimpinan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah dalam pencegahan fraud dapat ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana di sektor publik

DAFTAR RUJUKAN

- Adiko, R. G, Widia Astuty, Hafisah. (2019). "Pengaruh Pengendalian Internal, Etika Auditor, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud PT Inalum". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2(1), 52–68.
- Akbar, A. G, Rosidi, Wuryan Andayani. (2019). "Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi". *Jurnal Economica*, 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23618>
- Arifin, Z, Fathurrahman. (2022). "Analysis Of The Commitment Of Organizations And Government Internal Control Systems To Fraud Prevention In The Government Sector". *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5545>
- Ayem, S, Kirana Feby Kusumasari. (2020). "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Baldock, G. (2016). "The Perception Of Corruption Across Europe, Middle East And Africa". *Journal of Financial Crime*, 23(1), 119–131. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0004>
- Dewi, K. A. K, Edy Sujana, Gede Adi Yuniarta. (2017). "Pengaruh Pengendalian Internal Kas, Moralitas Individu, Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Kas (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng)". *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9470>
- Eldayanti, K. R, Ayu Putu Indraswarawati, Wayan Yuniasih. (2020). "Penyebab Kecurangan dan Tindakan Pencegahan Fraud Melalui Sistem Pengendalian Intern". *Jurnal Akuntansi Dan*



- Pajak*, 23(2).
- Fresiliasari, O. (2023). "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–10. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Herawaty, N, Riski Hernando, R. (2021). "Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi City)". *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(2), 103–118. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i2.103-118>
- Islamiyah, F, Anwar Made, & Ati Retna Sari. (2020). "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak". *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Ladapase, L. I. M. (2019). "Pengaruh kompetensi aparatur, motivasi aparatur, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, Dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka". <http://repository.usd.ac.id/id/eprint/34891>
- Liberati, A, Douglas G Altman, Jennifer Tetzlaff, Cynthia Mulrow, Peter C Gøtzsche, John PA Ioannidis, Mike Clarke, PJ Devereaux, Jos Kleijnen, David Moher. (2009). "The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration". In *Journal of clinical epidemiology* (Vol. 62, Issue 10). <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.006>
- Pattawe, A. (2023). "The Influence of The Internal Control System And Accountability On Fraud Prevention In Village Financial Management". *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 217–228. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.652>
- Romadaniati, Taufeni Taufik, Azwir Nasir. (2020). "Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Fraud di Kabupaten Bengkalis". *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 237–252.
- Simbolon, D. (2017). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi". *Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Taufik, T. (2019). "The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact On Fraud Prevention". *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 2159–2165.
- Tuanakotta, T. (2013). *Audit berbasis ISA (International Standards On Auditing)*. Salemba Empat. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-12746>
- Widiyarta, K, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmadja. (2017). "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng)". *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12. <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13930>
- Widyatama, A, Lola Novita, Diarespati. (2017). "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa". *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.



<https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>

- Wiliana, R, Febby Rachmadani, Syamsuddin, Nadhirah Nagu, Achmad Fadel Farid. (2023). "Internal Control System On Fraud Prevention Moderate By Bugis Cultural Values". *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(2), 237–252. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i2.1549>
- Wonar, K, Falah Syaikhul, Pangayow Bill. (2018). "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik". *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(2), 123–134.
- Wulandari, N. (2021). "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan dana Desa (Studi Kasus Empat Belas Desa Di Kecamatan Wonosari)". *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.